

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945  
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang  
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  
Undang Undang Pokok Agraria  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19  
Tahun 2016 dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan  
Pengaturan Pertanahan  
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan  
Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah  
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi  
Sertipikat Hak Atas Tanah  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas  
Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan  
Transaksi Elektronik  
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis  
Elektronik (SPBE)

### Buku

- Diana, R W, S H Napitupulu, M Kn, Pusat Penerbitan, Pencetakan Buku, and  
Perguruan Tinggi. *Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dan  
Peralihannya)*. Jakarta: Uki Press, 2022.  
Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-  
Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.  
Isnaini, and Anggreni. A Lubis. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Medan:  
Pustaka Prima, 2022.  
Katharina, Riris. *Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta:  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.  
Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada, 2003.  
Marwiyah, Siti. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era  
Digitalisasi*. Makassar: CV. Mitra Ilmu, 2023.  
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.  
Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Murad, Rusmadi. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju, 2013.
- Ratminto. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sumardjono, Maria SW. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wibowo, Richo Andi, and Et Al. *Hukum Administrasi Negara : Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer, Dan Kasus*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

### **Skripsi atau Disertasi**

- Arif, Mukamad. "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Elektronik." Skripsi, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Azhari, Ade Bahtiar. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Pendaftaran Tanah Elektronik." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Hartati, Maria. "Dampak Bencana Banjir Terhadap Warkah Pertanahan Dan Upaya Pemulihannya Di Kantor Pertanahan Kota Bekasi." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2024.
- Kurniati, Dwi Yuni. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Pemilik Sertipikat Tanah Dalam Penerapan Sistem Online Di Kabupaten Sorong." Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2025.
- Ngompat, Yohanes Leonardus. "Ketidaksetaraan Sanksi Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." Thesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, 2023.
- Paradigma, A Muh Farid. "Analisis Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Makassar." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, 2023.
- Salbiyah. "Penerapan Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Suryana, Ade Yaya. "Optimalisasi Pengelolaan Informasi Di Era Digital Guna Menyukkseskan Pembangunan Nasional." Kertas Karya Ilmiah Perseorangan, Program Pendidikan Reguler Angkatan, Lembaga Ketahanan Republik Indonesia, 2024.

### **Jurnal Ilmiah**

- Adhimsyah, Raizal, and Akbar Said. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelayanan Publik Perangkat Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar." *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis* 6, no. 1 (2024): 148–53. <https://doi.org/10.36917/japabis.v6i1.114>.

- Ah, Say ', Siti Raudah, and Nida Urahmah. "Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku Dalam Menunjang Sistem Pelayanan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Administrasi Negara* 6, no. 2 (2025): 864–74.
- Andari, Dwi Wulan Titik, and Dian Aries Mujiburohman. "Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik." *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 155. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7367>.
- Annisa, Revalina. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Menjadi Hak Milik." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2025): 364–277. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3065>.
- Arumdiya, Filany Cahya. "Implementasi ISO 27001:2022 Dalam Manajemen Risiko Keamanan Informasi." *Jurnal PETISI* 06, no. 02 (2025): 58–71.
- Bratanata, Daniel Sandi, and Dkk. "Analisis Implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Transjakarta, Gobis Suroboyo, Dan Mitra Darat." *Etika Teknologi Informasi* 1, no. 1 (2024).
- Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, and Nafisah Muthmainnah. "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- Dhianty, Rama. "Kebijakan Privasi ( Privacy Policy ) Dan Peraturan Perundang-Undangan Sektor Platform Digital Vis a Vis Kebocoran Data Pribadi." *Scripta, Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 186–99.
- Hamirul. "Potret Patologi Birokrasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria Dan Tata Ruang (BPN-ATR), Kota Cimahi." *Jurnal Ilmu Administrasi* 8, no. 2 (2020).
- Indriani, Masitoh, and Annida Aqiila Putri. "Persetujuan Dinamis Sebagai Sarana Optimalisasi Perlindungan Data Pribadi Dan Hak Atas Privasi." *Jurnal HAM* 14, no. 2 (2023): Hlm. 105-122. <https://core.ac.uk/download/pdf/588273248.pdf>.
- Kaunang, Mikha Ch. "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997." *Lex Crimen V*, no. 4 (2016): 68–75.
- Rizal, Muhammad Saiful, Yuliati Yuliati, and Siti Hamidah. "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Transportasi Online." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 68. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8959>.
- Rosdiyanti, Evi, Noni Antika Khairunnisah, and Mawardi Mawardi. "Pengaruh Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Wera." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 5, no. 2 (2023): 45–48. <https://doi.org/10.58258/jihad.v5i2.5961>.
- Ryanindityo, Mochammad, Koesmoyo Ponco Aji, Bobby Briando, and M. Alvi Syahrin. "Transformasi Digital Untuk Meningkatkan Layanan Dan Keamanan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Basis Data Terintegrasi." *Jurnal Administrasi Publik* 21, no. 1 (2025): 1–31. <https://doi.org/10.52316/jap.v21i1.429>.
- T. Ahmad Denada. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara

Sporadik Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya ( Suatu Perbandingan Dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis ).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 1 (2021): 26–34.  
Tanri, Arif. “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.” *Notarius* 13, no. 2 (2020).

### Laporan

Kementerian ATR/BPN. “Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Dan Tata Ruang Secara Elektronik.” Jakarta, n.d. diakses 20 Oktober 2025

### Artikel Internet

- Apri, Muhamad. “Mitos Atau Fakta! Apakah Urus Tanah Di Kantor Pertanahan Harus Pakai Calo?” Kantah Kab. Pasaman, 2025. [https://kab-pasaman.atrbpn.go.id/infografis\\_pertanahan/mitos-atau-fakta-apakah-urus-tanah-di-kantor-pertanahan-harus-pakai-calo](https://kab-pasaman.atrbpn.go.id/infografis_pertanahan/mitos-atau-fakta-apakah-urus-tanah-di-kantor-pertanahan-harus-pakai-calo). diakses 16 Oktober 2025
- ATR/BPN Klaten. “Pelayanan Pertanahan Di ATR BPN Kab Klaten: Menjawab Kebutuhan Masyarakat.” ATR/BPN Klaten, 2025. <https://atrbpnkabklaten.com/pelayanan-pertanahan-di-atrbpn-kab-klaten-menjawab-kebutuhan-masyarakat-2/>. diakses 22 Oktober 2025
- Azzahra, Nabiila. “Kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN Diduga Akibat Korsleting AC.” *Tempo.co*, 2025. <https://www.tempo.co/politik/kebakaran-gedung-kementerian-atr-bpn-diduga-akibat-korsleting-ac-1204686>. diakses 16 Oktober 2025
- Biro Humas Kominfo. “Siaran Pers No. 138/HM/KOMINFO/07/2023 Tentang Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data Paspur 34,9 Juta Warga Indonesia.” Kemkominfo, 2023. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-138-hm-kominfo-07-2023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspur-34-9-juta-warga-indonesia>. diakses 16 Oktober 2025
- Caroline, Rachel. “Polemik Data Pribadi: 5 Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Selama 2023-2024.” *Tempo.co*, 2025. <https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924>. diakses 15 Oktober 2025
- Diandra, Annisya. “Dugaan Kebocoran Data Dukcapil: Ada 337 Juta Data, Mulai Dari NIK Hingga Akta Kelahiran.” *Tempo.co*, 2023. <https://www.tempo.co/digital/dugaan-kebocoran-data-dukcapil-ada-337-juta-data-mulai-dari-nik-hingga-akta-kelahiran-165447>. diakses 16 Oktober 2025
- Google. “Apa Itu Enkripsi?” Google Cloud, 2025. <https://cloud.google.com/learn/what-is-encryption?hl=id>. diakses 28 Agustus 2025
- Hamalatul. “Tips! Hindari 6 Kesalahan Umum Dalam Pembuatan Kontrak Berbahasa Inggris.” *Hukum Online*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-hindari-6-kesalahan-umum-dalam-pembuatan-kontrak-berbahasa-inggris-lt5e7c848370a34/>. diakses 15 September 2025

- Indrarto, Patnuaji Agus. “Digital Governance Yang Partisipatif: Peran Publik, Kepemimpinan Digital, Dan Pengawasan Pelayanan Publik,” 2025. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--digital-governance-yang-partisipatif-peran-publik-kepemimpinan-digital-dan-pengawasan-pelayanan-publik>. diakses 1 Agustus 2025
- KBBI. “Pengertian Pribadi,” n.d. <https://kbbi.web.id/pribadi>. diakses 3 Juni 2025.
- Kementerian ATR/BPN. “Sekilas, Target Dan/Atau Capaian Program Dan Kegiatan Sertipikat Elektronik.” ATR/BPN, 2025. <https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/page/details/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat?level1=21&level2=1>. diakses 10 Agustus 2025
- Kementerian PANRB. “Launching Aplikasi Umum SPBE.” Kementerian PANRB, 2020. <https://menpan.go.id/site/berita-foto/launching-aplikasi-umum-spbe>. diakses 17 Oktober 2025
- Kementerian PANRB. “SPBE.” PAN-RB, 2020. <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2>. diakses 17 Oktober 2025
- Kiswara, Dida Rizakti. “Efektivitas Pengawasan Ombudsman RI Dalam Penanganan Maladministrasi Pertanahan.” Ombudsman RI, 2025. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--efektivitas-pengawasan-ombudsman-ri-dalam-penanganan-maladministrasi-pertanahan>. diakses 16 Oktober 2025
- Kominfo. “Apa Itu Enkripsi? Kenali Jenis Dan Fungsinya Untuk Keamanan!” Kominfo Kota Bengkulu, 2023. <https://kominfo.bengkulukota.go.id/apa-itu-enkripsi-kenali-jenis-dan-fungsinya-untuk-keamanan/>. diakses 28 Agustus 2025
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran,” 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-melakukan-pendaftaran-lt598832e6a5643/>. diakses 1 Agustus 2025
- Proxis IT GRC. “Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 Beri Jaminan Keamanan Tingkat Tinggi, Menilik Spesifikasi Bitera Data Center.” Proxis IT GRC, 2024. <https://it.proxisgroup.com/sertifikasi-iso-iec-270012022-beri-jaminan-keamanan-tingkat-tinggi-menilik-spesifikasi-bitera-data-center/#:~:text=Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 membantu organisasi melindungi data dari,penyalahgunaan data yang dapat merugikan>. diakses 30 Agustus 2025
- Putranto, Aryo. “Data NPWP Bocor, Kesiapan Pemerintah Kelola Data Pribadi Dipertanyakan.” Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/11370801/data-npwp-bocor-kesiapan-pemerintah-kelola-data-pribadi-dipertanyakan>. diakses 16 Oktober 2025
- Putranto, Aryo. “Kebocoran Data Dukcapil Diduga Akibat Faktor ‘Server’ Tua.” Kompas.com, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/18/16000031/kebocoran-data-dukcapil-diduga-akibat-faktor-server-tua?page=all.%0A>. diakses 16 Oktober 2025

- Ramli, Ahmad M. “Pemrosesan Data Pribadi Menurut UU PDP Dan Status Eksisting.” Kompas.com, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/23/11333391/pemrosesan-data-pribadi-menurut-uu-pdp-dan-status-eksisting?page=all>. diakses 30 Agustus 2025
- Riau Detik.com. “Ada Apa Di BPN Inhu, Ngurus Sertifikat Bertahun-Tahun Tak Selesai.” Riau Detik.com, 2022. [https://riaudetil.com/news/daerah/indragiri-hulu/ada-apa-di-bpn-inhu-ngurus-sertifikat-bertahun-tahun-tak-selesai\\_2022-02-14](https://riaudetil.com/news/daerah/indragiri-hulu/ada-apa-di-bpn-inhu-ngurus-sertifikat-bertahun-tahun-tak-selesai_2022-02-14). diakses 16 Oktober 2025
- Riska, Nova. “Pendaftaran Tanah Pertama Kali.” Kantah Kab. Pali, 2025. <https://kab-pali.atrbpn.go.id/berita/pendaftaran-tanah-pertama-kali>. diakses 5 November 2025
- Riska, Nova. “Pendaftaran Tanah Pertama Kali.” Kementerian ATR/BPN, 2025. <https://kab-pali.atrbpn.go.id/berita/pendaftaran-tanah-pertama-kali>. diakses 20 Agustus 2025
- Salam, Abd. “Pelayanan Pemeliharaan Data Lainnya.” Kantah Kota Pare Pare, 2025. <https://kot-parepare.atrbpn.go.id/formulir-permohonan/i-pelayanan-pemeliharaan-data-lainnya>. diakses 5 November 2025
- Sekar, Aisyah. “Kurangi Kunjungan 55 Persen, Aplikasi Sentuh Tanahku Baru Diunduh 112.000 Pengguna.” Kompas.com, 2021. [https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/25/123000321/kurangi-kunjungan-55-persen-aplikasi-sentuh-tanahku-baru-diunduh?page=all&utm\\_source=Google&utm\\_medium=Newstand&utm\\_campaign=partner](https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/25/123000321/kurangi-kunjungan-55-persen-aplikasi-sentuh-tanahku-baru-diunduh?page=all&utm_source=Google&utm_medium=Newstand&utm_campaign=partner). diakses 10 Agustus 2025
- Setiadi, Tresno. “Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Kantor BPN Brebes Yang Hanguskan 6.000 Sertifikat Tanah.” Kompas.com, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/07/14/234846078/polisi-selidiki-penyebab-kebakaran-kantor-bpn-brebes-yang-hanguskan-6000>. diakses 16 Oktober
- Sulistyo, Luthfi. “Target PTSL 2025 Sebesar 1,5 Juta Bidang, Menteri Nusron: Strategi Efisiensi Dan Penyesuaian Tanah Yang Tersisa.” Kementerian ATR/BPN, 2025. <https://www.atrbpn.go.id/berita/target-ptsl-2025-sebesar-15-juta-bidang-menteri-nusron-strategi-efisiensi-dan-penyesuaian-tanah-yang-tersisa>. diakses 21 Oktober 2025
- Victor william Benu. “Membaca Hak Publik Di Kantor Pertanahan.” Ombudsman RI, 2020. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--membaca-hak-publik-di-kantor-pertanahan>. diakses 9 Mei 2025.
- Wijaya, David. “Penataan Warkah Untuk Perkuat Tertib Administrasi Pertanahan.” Kementerian ATR/BPN, 2025. <https://kab-enrekang.atrbpn.go.id/berita-kantor-pertanahan-kabupaten-enrekang/penataan-warkah-untuk-perkuat-tertib-administrasi-pertanahan>. diakses 5 Agustus 2025
- Wijayanti, Ita. “Layanan Sengkarut, Sertifikat Berlarut.” Ombudsman RI, 2022. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--layanan-sengkarut-sertifikat-berlarut>. diakses 16 Oktober 2025
- Yudha, Eka. “Menteri ATR Pecat Pejabat BPN Cimahi Yang Terciduk Lakukan Pungli.” Tempo, 2022. <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-atr-pecat>

pejabat-bpn-cimahi-yang-terciduk-lakukan-pungli-326589. diakses 16  
Oktober 2025.